

MENAKAR PELUANG PERADABAN DEMOKRASI INDONESIA

Randi Muchariman

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Abstrak

Pengetahuan dan praktik demokrasi hadir dalam konteks peradaban dan pandangan alam tertentu. Keadaan tersebut menegaskan bahwa Demokrasi bukan sesuatu yang universal atau narasi besar yang bisa diberlakukan sama untuk seluruh wilayah di dunia. Oleh sebab itu, demokrasi di Indonesia harus dilihat dalam relevansinya dengan keadaan sosial politik dan konstitusi di Indonesia.

Irelevansi terjadi dalam wacana dan praktik demokrasi di Indonesia karena benturan pandangan alam Islam dan Barat di Indonesia. Proses hegemoni menempatkan demokrasi sebagai kesadaran umum (*common sense*) namun tidak mengubah pandangan alam masyarakat yang seharusnya menjadi dasar untuk berbagai kesadaran umum tersebut.

Persoalan relevansi tersebut menjelaskan arah pembangunan politik di Indonesia serta peluang peradaban demokrasi di Indonesia. Beberapa pilihan diajukan untuk keadaan tersebut dalam tulisan ini dengan merujuk kepada sejarah sosial politik dan konstitusi di Indonesia. Terdapat tiga peluang penting bagi masa depan peradaban demokrasi di Indonesia sebagai sebuah kesimpulan yang didapat menggunakan teori penjajahan intelektual dan metode analisis wacana.

Kata Kunci: Demokrasi, Islam, Barat, analisis wacana, penjajahan intelektual

Abstract

The knowledge and practice of democracy is present in the context of civilization and worldview. The fact affirms that Democracy is not universal or the one great narration for around the world. Therefore, democracy in Indonesia must be analysis in relevance to the socio-political and constitutional conditions in Indonesia.

Irrelevance occur in the discourse and practice of democracy in Indonesia because of the clash worldview of Islam and Western worldview in Indonesia. The hegemonic process has been established democracy as a common sense but does not convert worldview of society that should be the basis for such common consciousness.

The issue of relevance explains the direction of political construction in Indonesia as well as the opportunities of democratic civilization in Indonesia. This paper are proposed some choices for the situation with reference to the social and political history of the Indonesia costitution. Have been three important opportunities as the future of democratic civilization in Indonesia as a conclusion with generated of the intellectual imperialism theory and discourse analysis methods.

Keywords: Democracy, Islam, Western, discourse analysis, intellectual imperialism

Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu tatanan politik yang ditandai oleh pengakuan terhadap kebebasan individu untuk mempergunakan hak-hak politiknya. Demokrasi adalah sebuah peradaban yang lahir dari usaha manusia demokrasi untuk memperjuangkannya. Lipson (1964) menyebut demokrasi sebagai satu keadaan pertengahan yang menunjukkan persamaan diantara dua titik ekstrem yang menyeragamkan dan memberikan hak-hak khusus, serta kebebasan yang merupakan keadaan pertengahan antara dua titik ekstrem despotisme dan anarkisme.

Senada dengan pemikiran Lipson yang menyebutkan demokrasi sebagai hasil dari peradaban manusia demokrasi, Markof (2002) menyebutkan bahwa demokrasi adalah suatu gambaran unik dari peradaban dan sejarah Barat, yang dengan hal itu pula demokrasi dapat dipahami. Penjelasan bahwa terdapat gelombang demokrasi di dunia sesungguhnya menunjukkan perkembangan dari peradaban itu sendiri dalam menyebarkan demokrasi.

Memahami demokrasi dengan cara seperti itu berarti menempatkan Demokrasi dalam pemahaman substansial di satu sisi dan prosedural di sisi lainnya. Gagasan mendasar dari kontrak sosial yang dicetuskan oleh Rousseau (1986) di abad ke 18, meskipun telah mendapatkan kritik terpenting dari model demokrasi prosedural (Dahl, 2003: 5-8), telah meletakan konsep-kunci yang memungkinkan gagasan demokrasi diterima dan dapat dikembangkan. Sedangkan gagasan dari pemikir demokrasi prosedural telah menempatkan demokrasi sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan. Pelaksanaan pemilu menjadi salah satu indikator terpenting sebuah negara melakukan demokrasi selain indikator lainnya terkait dengan pengakuan kemanusiaan yang meliputi hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kesimpulan dari semua itu adalah menyebutkan demokrasi sebagai suatu

pengetahuan, sesungguhnya hadir dan berkembang dalam suatu konteks peradaban tertentu dan tidak memastikan keniscayaan universal. Kesepakatan tentang demokrasi itu sendiri tidak pernah tercapai oleh ilmuwan politik di dunia dalam rentang sejarah pengetahuannya. Para pemikir filsafat di masa Yunani seperti Socrates dan Plato menilai bahwa demokrasi bukan suatu pilihan yang terbaik. Sebaliknya, para pemikir politik Barat Modern menilai bahwa demokrasi adalah pilihan wajar dan terbaik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan sesungguhnya memiliki konteks sosial politik dan bahkan peradaban tertentu.

Makalah ini adalah sebuah rintisan awal yang dilakukan melalui kajian pustaka untuk meninjau kedudukan demokrasi di Indonesia secara konstitusional dan sosiologis. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana dan semiotika sosial untuk melihat hubungan produksi pengetahuan dengan praktik sosial atau sejarah. Kajian seperti ini dilakukan untuk menunjukkan, menguji dan memberikan tawaran untuk pengembangan ilmu sosial yang lebih relevan bagi Indonesia. Secara ringkas, kajian ini dituntun oleh rumusan masalah berikut; bagaimana peluang pembangunan peradaban demokrasi di Indonesia?

Rumusan tersebut penting agar produksi pengetahuan tentang demokrasi dan politik di Indonesia yang relevan berkembang sehingga peran pengetahuan terhadap praktik politik dapat lebih baik. Irrelevansi¹ teori dan konsep Barat dalam konteks non-Barat harus dihindarkan. Produksi pengetahuan tentang demokrasi di Indonesia termasuk salah satu yang terpenting untuk ditunjukkan, diuji relevansi atau irrelevansinya dan kemungkinannya untuk diberikan rumusan tawaran tertentu. Persoalan relevansi dan irrelevansi ini pada dasarnya menunjukkan peluang pembangunan peradaban demokrasi di Indonesia.

Jawaban terhadap rumusan masalah ini

penting untuk menunjukkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam usaha membangun kehidupan politik di Indonesia yang lebih baik. Penggunaan metoda semiotika sosial untuk menganalisis konstitusi akan bermanfaat bagi penguatan negara dan integrasi sosial politik, khususnya pencapaian tujuan kehidupan sosial politik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi, khususnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Demokrasi dan Civil Society

Sebagai sebuah fakta, demokrasi di Indonesia telah menjadi sebuah kesadaran umum² yang didukung oleh negara melalui proses pendisiplinan dan pendidikan. Demokrasi telah menjadi konsensus mayoritas masyarakat Indonesia yang ditandai oleh tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di atas 60 persen. Sebagai sebuah konsensus, demokrasi telah mengikat pilihan berpikir dan tindakan masyarakat.

Praktik demokrasi di Indonesia pada Reformasi saat ini, sebagai sebuah kesadaran umum, didahului oleh produksi, distribusi dan konsumsi pengetahuan.³ Untuk menjadi kesadaran umum, demokrasi didukung oleh intelektual atau kelompok intelektual yang melakukan diskursus. Memahami produksi, distribusi, konsumsi dan diskursus tersebut merupakan langkah pertama untuk menakar peradaban demokrasi di Indonesia.

Pada era tahun 1990 an, terjadi diskursus demokrasi antara gagasan *civil society* yang tidak diterjemahkan oleh A.S. Hikam dengan gagasan masyarakat madani oleh Nurcholish Madjid.⁴ Diskursus terjadi salah satunya melalui sebuah pertanyaan, apakah *civil society* dapat diterjemahkan secara tepat dalam konteks sosial politik di Indonesia? A.S Hikam membiarkan istilah itu dengan bunyi aslinya,⁵ sedangkan Nurcholish Madjid menterjemahkannya dengan masyarakat madani. Tepatnya,

istilah masyarakat madani dianggap sinonim atau koreferensi kepada *civil society*.

Nurcholish Madjid menganggap bahwa antara istilah *civil society* dengan masyarakat madani tidak terdapat perbedaan secara substansi dan epistemologis. Pendapatnya berbeda dengan Adi S. Cula⁶ dalam disertasinya yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan konseptual dari kedua istilah tersebut, meskipun ia tidak menjelaskan dalam penelitiannya.

Studi atas penggunaan istilah masyarakat madani (*civil society*) oleh Nurcholish Madjid telah dilakukan oleh Randi Muchariman.⁷ Tesis tersebut menunjukkan bahwa Nurcholish Madjid telah mengalihkan makna masyarakat madani yang dipopulerkan oleh Anwar Ibrahim⁸ yang bersumber dari Syed Naquib Al Attas kepada makna yang diwacanakannya. Pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia dan komunitas ilmuwan dan lembaga negara terhadap masyarakat madani menjadi koreferensi terhadap *civil society*.⁹ Penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa produksi pengetahuan Nurcholish Madjid tentang *civil society* sesungguhnya bertujuan agar kelompok kelas menengah Islam, yang pada saat itu memiliki kekuatan yang berpengaruh terhadap perubahan Indonesia,¹⁰ dapat menerima perubahan politik sesuai dengan yang dikehendaki oleh kelas kapitalis neoliberal.

Kesimpulan dari diskursus antara A.S Hikam dan Nurcholish Madjid itu menunjukkan dua contoh kasus yang berbeda. Kasus pertama ditunjukkan oleh A.S. Hikam yang menolak melakukan kontekstualisasi dari istilah *civil society* dan lebih memilih untuk tetap menjaga makna semula sehingga tidak diterjemahkan. Kasus yang kedua ditunjukkan oleh Nurcholish Madjid yang berusaha untuk melakukan kontekstualisasi (tepatnya melakukan proses akomodatif terhadap pandangan alam Barat) dan telah melakukan hegemoni terhadap satu komunitas tertentu.

Kontekstualisasi yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid didukung oleh sikap akomodatif¹¹ terhadap Barat sehingga tidak melakukan pembedaan yang mendasar antara istilah *civil society* dan masyarakat madani. Sikap akomodatifnya terhadap Barat telah menempatkan nilai-nilai dan konsep-konsep Barat untuk menilai dan mengukur nilai-nilai dan konsep-konsep yang terdapat dalam istilah masyarakat madani.¹²

Dalam diskursus sejarah pemikiran Barat, makna *civil society* tidak seragam.¹³ Michel Edward misalnya, menjelaskan *civil society* sebagai asosiasi-asosiasi yang otonom terhadap negara. Asosiasi tersebut dapat lahir dan berkembang dalam ruang publik yang bebas, yang mengakui adanya persamaan individu dan tanpa kekerasan.¹⁴ Semua itu didasari oleh nilai-nilai keadaban atau *civility*. Pemikiran tentang *civil society* inilah¹⁵ yang diterima dan menjadi kesadaran umum di Indonesia.

Meskipun terdapat perbedaan terkait pengertian *civil society*, namun konsep ini menunjukkan pengalaman kehidupan Barat yang sangat penting dan mendasar. Yakni terkait dengan perjuangan orang-orang Barat untuk mendapatkan kebebasan berpikir dan berbicara (Bury, 1913) mencapai kebebasan akal dan politik yang merupakan sejarah panjang tercapainya demokrasi. Oleh karena itulah, Lipson menulis bukunya dengan judul *The Democratic Civilization*.

Demokrasi menurut Lipson adalah sebuah hasil perkalian dari kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*) dan terhindar dari keadaan *anarchy*, *despotism*, *uniformity*, dan *privilage*. Pengakuan akan nilai-nilai tersebut yang akan memungkinkan munculnya toleransi dalam kehidupan sosial dan politik yang merujuk kepada pengalaman sejarah di era Yunani (Bury, 1913). Menurutnya, demokrasi terlahir sebagai sebuah akumulasi dari usaha yang dilakukan oleh manusia demokrasi. Hanya manusia demokrasilah yang mampu membangun demokrasi. Oleh karena itulah,

Lipson menganggap demokrasi adalah sebuah peradaban yang dibangun oleh manusia demokrasi.

Kesimpulan tersebut didukung oleh pernyataan John Markof (2002: 15-17) yang menyebutkan bahwa untuk memahami demokrasi para sarjana menyebutkan tiga pendekatan. Ketiga pendekatan itu diajukan untuk menjawab fakta mengapa Demokrasi berkembang di Eropa Barat dan wilayah-wilayah koloninya. Pendekatan pertama mengajukan budaya Barat dalam membatasi kekuasaan negara sebagai penjelasannya. Pendekatan kedua menganalisa pengaturan kehidupan ekonomi politik di Barat. Pendekatan ketiga menekankan kepada hubungan ekonomi politik dan kultural di Eropa dengan luar Eropa. Dari ketiga pendekatan tersebut, John Markof menempatkan Barat sebagai penjelas bagi demokrasi.

Seluruh penjelasan tersebut membawa kepada kesimpulan bahwa Demokrasi sesungguhnya lahir dan berkembang dalam konteks peradaban Barat. Dan hanya bisa dipahami dengan cara memahami peradaban Barat itu sendiri. Kesimpulan ini penting untuk dapat melakukan proses kontekstualisasi sehingga irelevansi dalam ilmu politik di Indonesia bisa dihindari.

Penjelasan yang memuaskan tentang Barat diberikan oleh Syed Muhammad Naquib Al Attas (2010) yang menyebutkan lima sifat asasi dalam peradaban Barat (Melihat Barat sebagai suatu pandangan alam). Kelima sifat asasi itu adalah penggunaan ratio semata dan berdasarkan kepada falsafah, penerimaan terhadap pandangan sekular, dukungan terhadap doktrin humanisme, penduaan secara mutlak terhadap hakikat, serta penerimaan paham tragedi sebagai bagian inti dari kehidupan. Selain kelima hal tersebut, Al Attas (1991) menyebutkan pandangan kebangsaan menjadi salah satu ciri dari capaian terpenting dalam kehidupan sosial Barat serta pandangan terhadap agama sebagai sebuah kepaluan dan keraguan.

Apabila Nurcholish Madjid

menempatkan *civil society* koeksistensi sinonim dengan masyarakat madani yang bersumber dari peradaban Islam, maka secara mendasar sifat asasi Barat tersebut berbeda dengan sifat asasi peradaban Islam. Dalam khazanah Islam, peradaban disebut dengan istilah tamadun yang berasal dari kata madinah dan berasal dari kata din. Kata din itu sendiri adalah istilah yang dipergunakan oleh Al Quran untuk menjelaskan Islam. Oleh sebab itu, agama dan berbagai konsep-konsep kunci atau pandangan alam Islam dengan Barat itu berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan satu cara pandang serta penjelasan dan konsep kehidupan yang berbeda, termasuk dalam politik.

Kesimpulan ini sesuai dengan penjelasan Huntington (1997) ketika menunjukkan hubungan demokrasi dengan Islam.¹⁶ Kesimpulan ini penting untuk memahami politik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebelum Indonesia berdiri diatur dalam struktur kekuasaan kesultanan-kesultanan Islam.¹⁷ Artinya, Islam telah menyusun terlebih dahulu peradaban di Indonesia, Islam telah memberi makna dalam konteks sosial politik di Indonesia, Islam telah menjadi satu kesadaran umum yang lebih dahulu hadir dan mengakar sebelum kesadaran umum demokrasi berkembang seperti saat ini.¹⁸

Hal tersebut tidak berarti bahwa peradaban Indonesia adalah peradaban Islam. Pernyataan itu tertolak karena peradaban di Indonesia juga dibangun dan dipengaruhi oleh peradaban Barat melalui proses penjajahan (kolonialisasi) dan penaklukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (PKHB) terhadap kesultanan-kesultanan Islam. PKHB telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk menanamkan pengaruh dari budaya Barat terhadap wilayah-wilayah yang telah ditaklukannya baik melalui perjanjian maupun melalui peperangan.

Salah satu kebijakan yang dianggap berpengaruh terhadap perubahan budaya di Indonesia adalah kebijakan politik etis

yang telah membangun satu generasi baru yang terlepas dari struktur sosial politik dan pendidikan sebelumnya.¹⁹ Politik etis dirancang oleh Hurgronye sebagai sebuah upaya untuk melakukan asosiasi, asimilasi dan unifikasi atau emansipasi pribumi (orang Islam di Hindia Belanda) dari Islam (Noer, 1994:105).

Pengaruh dari politik etis itu tampak dalam perdebatan yang terjadi di tahun 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 10 Juli tentang kalimat "*Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya...*" perdebatan terjadi antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan²⁰ dan pengaruh itu tetap bertahan hingga saat ini.

Pertanyaan penting yang harus diajukan selanjutnya, apakah konstitusi Indonesia, khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun pada tahun 1945 tersebut tersusun sebagai produk dari satu peradaban ataukah tersusun sebagai produk dari perpaduan antar peradaban? Serta bagaimanakah konteks sosial politik yang harus dirumuskan dan ditentukan untuk Indonesia saat ini.

Yudi Latif berpendapat bahwa Pembukaan adalah hasil kompromi antara kelompok Islam dan Kebangsaan.

"Pembukaan UUD NRI 1945 mencerminkan usaha kompromi antar berbagai golongan utamanya antara apa yang kerap disebut sebagai golongan Islam dan kebangsaan. Titik temu antara kedua golongan tersebut diikat pada **alinea ketiga** : " **Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...**" Alinea ini mencerminkan pandangan golongan kebangsaan yang bebas, dan menitikberatkan kehidupan kebangsaan yang bebas, dan golongan Islam- yang melandaskan perjuangannya atas rahmat Allah."²¹

Pendapat Yudi Latif ini sesungguhnya

mencerminkan cara pandang Barat dalam melihat persoalan di tahun 1945 tersebut dan mengabaikan cara pandang Islam. Pengabaian ini mengakibatkan hilangnya pemahaman terhadap pilihan sikap yang diambil oleh para pemimpin Islam pada saat itu, yang tetap kukuh hingga pembubaran Konstituante oleh Soekarno, menghendaki Islam sebagai dasar negara Indonesia.

Kesimpulan Yudi Latif yang mengatakan bahwa **kebangsaan yang bebas** adalah mencerminkan golongan kebangsaan mengabaikan pendekatan semiotik bahasa terhadap alinea ketiga tersebut. Bawa, alinea ketiga tersebut sesungguhnya adalah satu kalimat yang utuh yang saling menjelaskan. Alinea ketiga tersebut juga sesungguhnya adalah satu kesatuan sebagai satu teks yang utuh dari keseluruhan alinea di Pembukaan.

Pendapat Yudi Latif ini sesungguhnya dapat dipahami secara jelas karena ia telah mengeluarkan makna kata dan bahasa atau semiotiknya dan mendasarkannya kepada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan demikian, bukan hubungan antara teks dan konteks yang menjadi acuan dalam memahami Pembukaan akan tetapi pidato Soekarno tersebut. Pidato Soekarno tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar dengan teks Pembukaan.

Makalah ini berpendapat bahwa teks Pembukaan tersebut sesungguhnya hanya dapat dipahami secara konsisten dan lebih bertanggungjawab dengan menggunakan tradisi keilmuan Islam. Dan teks Pembukaan tersebut sesungguhnya merupakan cerminan dari cara pandang Islam²² yang dimiliki oleh para pendiri bangsa, terutama di Panitia Sembilan.²³ Dan tidak mungkin pendiri bangsa dari golongan Islam pada saat itu akan menyetujui Pembukaan apabila tidak sesuai dengan Islam.

Pendapat bahwa Pembukaan dapat dipahami secara lebih baik, konsisten dan bertanggungjawab dengan tradisi keilmuan Islam tidak menjadi kesadaran umum di Indonesia saat ini. Sejak dari Dekrit Presiden

Soekarno tahun 1959 hingga saat ini kesadaran umum yang dibentuk oleh rezim penguasa tidak pernah menerima pendapat tersebut. Justru karena itulah, menurut makalah ini produksi pengetahuan sosial, khususnya ilmu politik mengalami irelevansi dan tidak mampu mengembangkan agenda keilmuan yang sesuai dengan konstitusi tersebut. Inilah sebab pertama dari irelevansi dalam ilmu sosial di Indonesia.

Kenyataan hari ini yang menjadikan demokrasi sebagai tafsir atas Pembukaan (khususnya alinea keempat tentang musyawarah), serta penggunaan diskursus *civil society* sebagai konteks sosial politik, menunjukkan ketidakmampuan produksi pengetahuan yang relevan dengan konstitusi dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Pernyataan Megawati, yang didasari atas keputusan pemerintah yang menyatakan tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila, bahwa pidato Soekarno sebagai tafsir resmi negara atas Pembukaan disangkal oleh makalah ini.

“Terima kasih Bapak Presiden. Artinya, secara resmi negara telah mengakui, bahwa Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia.”²⁴

Sebab yang kedua, irelevansi terjadi karena hegemoni atau penjajahan intelektual²⁵ yang terjadi dalam keadaan ilmu sosial di dunia. Indonesia, khususnya dalam pengembangan wacana politik, bertumpu pada gagasan demokrasi dan *civil society* dan relatif mengabaikan gagasan yang sejatinya terkandung konstitusi. Penjelasannya sebelumnya dalam makalah ini yang menunjukkan kasus Nurcholish Madjid menjadi bukti bahwa penjajahan intelektual itu benar-benar telah terjadi.

Penjelasan ini sesuai dengan kesimpulan dari Lutfi Assyaukanie (2011) yang menyebutkan bahwa sumber dari pemikiran muslim di Indonesia itu tidak dari satu sumber, namun dari sumber yang beragam. Dia menyebutkan tiga model demokrasi dalam sejarah Indonesia (terdiri dari Negara Demokrasi Islam, Negara Demokrasi Agama, dan Negara Demokrasi Liberal)

sebagai hubungan antara utopia dengan realitas politik yang terjadi. Tesis itu telah memberikan satu penjelasan yang memuaskan tentang hubungan pemikir muslim dengan sumber-sumber pengetahuan dari peradaban Islam dan Barat terkait dengan demokrasi.

Kesimpulan dan Saran

Kecenderungan yang ditunjukkan dalam sejarah Indonesia menunjukkan upaya untuk "mendamaikan" antara Peradaban Islam dan Barat. Indonesia tidak mampu meninggalkan Islam namun juga tidak mampu meraih Barat. Pandangan yang positif menyebutnya sebagai jalan tengah diantara keduanya, dan itulah nilai keindonesiaan yang unggul. Namun, apakah mungkin ketika Islam ditambah Barat sama dengan Indonesia dan Indonesia itu adalah sesuatu yang tersendiri, bukan Islam ataupun Barat? Dalam kasus demokrasi dan *civil society*, Indonesia itu bukan sesuatu yang tersendiri, namun Barat.

Apabila gagasan demokrasi dan *civil society* tidak berkembang di Indonesia, gagasan apakah yang harus dikembangkan dalam wacana politik di Indonesia? Pertanyaan seperti ini menunjukkan eksistensi penjajahan intelektual itu sendiri. Ketidakmampuan untuk memahami perbedaan mendasar antara peradaban Islam dan peradaban Barat dan bagaimana hubungan diantara kedua peradaban tersebut. Secara lebih tegas, hal itu menunjukkan eksistensi irelevansi dalam ilmu sosial di Indonesia.

Oleh karena untuk menakar peluang peradaban demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh pendidikan untuk melahirkan manusia demokrasi, maka perlu diukur bagaimana perubahan itu akan terjadi. Akan tetapi peluang peradaban demokrasi dengan cara itu akan menghadapi kendala yang berarti karena demokrasi tidak sepenuhnya sesuai dengan Islam dan ketidaksesuaian itu terletak dalam

persoalan yang mendasar, nilai-nilainya yang mendasar dan bukan prosedural.

Keadaan seperti ini setidaknya memberi tiga konsekwensi pilihan. Pertama, Islam sebagai sebuah agama harus diubah. Doktrin Islam harus disesuaikan dengan doktrin Agama di Barat (Kristen) yang terbukti mendukung demokrasi.²⁶ Kesucian Al Quran harus disejajarkan dengan kesuciaan Injil dalam tradisi Kristen. Dengan semua hal ini, maka syariah akan kehilangan kewibawaannya dan tidak memiliki pengaruh (menjadi sangat kecil) terkait dengan legitimasi dan otoritas dalam kehidupan politik.

Pilihan yang kedua adalah mengubah pandangan ummat Islam terhadap Islam. Kesadaran umum terhadap ummat Islam dilakukan tanpa penekanan kepada pengubahan doktrin Islam. Cara seperti ini dilakukan melalui proses pendidikan baik di institusi formal maupun dalam pendidikan informal atau nonformal. Membuat orang Islam di Indonesia berpandangan sekular sehingga akan menempatkan Islam dengan pandangan tersebut.

Pilihan yang ketiga adalah memproduksi wacana yang lebih baik dari demokrasi dan *civil society*. Pilihan ini menghendaki pengakuan terhadap tradisi Islam dan proses Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer. Dengan cara seperti itu, produksi wacana yang berasal dari Barat tidak akan sepenuhnya ditolak, dan tidak akan juga sepenuhnya diterima. Penerimaan dan penolakan yang dilakukan secara tepat akan menjadikan wacana politik di Indonesia sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan sesuai dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 -yang menurut makalah ini lebih baik dan bertanggung jawab apabila dipahami melalui pandangan alam dan tradisi keilmuan Islam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga pokok gagasan yang disarankan yang berhubungan dengan kualitas wacana politik di Indonesia. Pengembangan wacana politik di Indonesia harus didasari atas

pemahaman terhadap peradaban dan pandangan alam Islam. Pemahaman yang baik terhadap hal ini akan menjadi semacam titik nodal²⁷ bagi proses pendidikan dan penelitian politik di Indonesia. Hal ini juga akan memberikan satu cara baru dalam melihat fakta-fakta sosial.

Langkah berikutnya adalah meningkatkan akses terhadap produksi pengetahuan yang dilakukan oleh ilmuwan sosial di sekitar wilayah kepulauan Indonesia baik yang masih berlangsung maupun yang telah dilakukan di masa lalu. Jejaring ilmuwan di satu sisi harus seiring dengan akses terhadap produksi pengetahuan.

Pelaksanaan langkah kedua tersebut adalah upaya penting untuk memastikan pendirian dan perkembangan lembaga atau pusat kajian yang bertujuan untuk menghilangkan irelevansi di Indonesia. Melalui langkah ketiga inilah, pada akhirnya, Indonesia akan memiliki satu wacana yang lebih relevan.

(Footnotes)

- 1 Menurut Farid Alatas irelevansi terjadi sebagai akibat dari keadaan penjajahan intelektual. irelevansi itu terkait dengan persoalan orisinalitas, peniruan, hingga pemahaman yang dangkal. Lebih lanjut baca di buku Alatas, Syed Farid. 2010. Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial: Tanggapan terhadap Eurosentrisme. Jakarta: Mizan. Hlm.129-157.
- 2 Kesadaran umum yang dimaksud disini merujuk kepada pengertian *common sense* menurut Gramsci dalam gagasan besarnya tentang hegemoni. Menurut Gramsci, kesadaran umum adalah dasar bagi berlakunya hegemoni. Hegemoni dapat terbentuk karena proses terbentuknya pengetahuan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam buku Gramsci, Antonio.1992. Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci. New York: International Publishers.. Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. Hlm. 57 Atau buku Simon, Roger. 2004. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 27.
- 3 Mengikuti Gramsci, Norman Fairclough menjelaskan hubungan antara wacana dengan perubahan sosial. Fairclough berpendapat bahwa wacana berfungsi untuk membangun naturalized discourse atau kesadaran umum yang akan membentuk makna identitas, hubungan sosial dan representasi. Dengan demikian, produksi, distribusi dan konsumsi wacana pada dasarnya upaya membentuk kesadaran umum dan kesadaran umum itu menunjukkan satu relasi politik yang disebut hegemoni. Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis : The Critical Study of

Language. Newyork: Longman.

⁴ Penjelasan tentang diskursus wacana ini telah diteliti oleh Ahmad Baso. Lebih lanjut dapat dibaca di Baso, Ahmad. 1999. Civil Society Versus Masyarakat Madani : Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia. Bandung: Pustaka Hidayah.

⁵ Menurut Baso, A.S Hikam berpandangan bahwa istilah *civil society* merupakan satu konsep khas yang dimiliki oleh budaya dalam sejarah masyarakat Barat. Oleh karenanya, dibiarkan dalam frase tersebut dan tidak diterjemahkan dalam rangka untuk menjaga orisinalitas dari konsep tersebut.

⁶ Disertasinya telah dibukukan. Suryadi, Adi. 2006. Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.

⁷ Muchariman, Randi. 2016. Kuasa Hegemoni Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) Nurcholish Madjid dan Perubahan Politik di Indonesia. Tesis di Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.

⁸ Pada tahun 1995, Anwar Ibrahim yang waktu itu menjabat sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia, mengadakan kunjungan ke Indonesia dan menyampaikan gagasan tentang masyarakat madani. Pada saat itu, Naquib Al Attas adalah guru Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim mendukung pendirian ISTAC yang didirikan oleh Naquib Al Attas. Lebih lanjut baca dalam buku Al Attas, Syed Naquib. 2010. Islam dan Sekularisme. Bandung: Pimpin.

⁹ Tentang hal ini misalnya dapat dibaca pengertian masyarakat madani yang ditulis oleh Tim Nasional Reformasi pada era Presiden Habibie. Lihat dalam buku Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.1999. Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Tim Nasional Reformasi.

¹⁰ Hefner misalnya menganggap Nurcholish Madjid dengan Abdurrahman Wahid sebagai dua orang yang paling berpengaruh dalam proses perubahan menuju Reformasi tahun 1998. Lebih lanjut dapat dilihat dalam buku ni, misalnya lihat buku Hefner, Robert. W.. 2001. Civil Islam : Islam dan Demokratisasi di Indonesia. Yogyakarta: ISAI dan TAF.

¹¹ Rachman, Budhy Munawar (penyunting). 2006. Ensiklopedi Nurcholish Madjid. Jakarta. Paramadina dan Mizan. Hlm. xxix

¹² Berbeda dengan Nurcholish Madjid, makna masyarakat madani yang didasari atas gagasan yang diutarakan oleh Naquib Al Attas terkait dengan makna din yang merupakan penjelasan Al Quran tentang Islam. Din terhubung dengan istilah madinah dan tamadun. Jadi, masyarakat madani adalah masyarakat yang melaksanakan din. Lebih lanjut tentang hal itu dapat dilihat dalam buku Al Attas, Syed Muhammad Naquib. 2010. Islam dan Sekularisme. Bandung: Pimpin.

¹³ Tentang perbedaan makna *civil society* di kalangan sarjana Barat dapat dilihat di Chandoke, Neera. 2001. Benturan Negara dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta. Penerbit Wacana.

- ¹⁴ Edwards, Michael.2011. Civil Society. UK.Polity Press. Hlm. 56-66
- ¹⁵ Affan Gafar misalnya menjelaskan *civil society* dalam penekanan sebagai tameng dari kekuasaan negara yang berlebih. Meski sekilas nampak berbeda, namun makna yang diberikan oleh Affan Gafar itu tidak koreferensi terhadap pemikiran Gramsci dan lebih koreferensi kepada pemikiran yang sama dengan yang diajukan oleh Michael Edwards. Lihat di buku Gaffar, Afan. 2002.Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- ¹⁶ Huntington menyebutkan bahwa Islam mengandung unsur-unsur yang bertentangan dan sesuai dengan demokrasi. Lihat dalam Samuel P. Huntington . 1997.Gelombang Demokrasi Ketiga. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Hlm. 396. Imam Al Ghazali misalnya, sebagai salah seorang ulama yang berpengaruh di dunia dan di Indonesia, menyebutkan bahwa pengaturan di dunia ini harus mengakui kedudukan Nabi Muhammad saw yang melakukan pengaturan terhadap hal lahir dan batin. Pemikiran Imam Al Ghazali ini jelas-jelas bertentangan dengan konsep demokrasi yang berlandaskan kepada konsep toleransi dan *civil society* menurut tradisi Barat. Tentang pemikiran Imam Al Ghazali dapat dilihat dalam buku Ihya Ulumiddin bab pertama tentang ilmu.
- ¹⁷ Bahkan ketika wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, struktur kekuasaan kesultanan atau tradisional yang terkait dengan Islam masih dipertahankan oleh Belanda. Di Priangan misalnya, kekuasaan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda bertumpu pada Bupati yang mereka tunjuk. Sedangkan itu, kekuasaan dan kewibawaan Bupati bertumpu pada pengakuan dan kedekatan mereka terhadap para ulama yang merupakan guru bagi para bangsawan dan masyarakat. Keadaan itu tetap berlangsung seperti itu hingga berlangsungnya Politik Etis yang mulai memutus struktur kekuasaan hegemoni Islam yang terbangun karena pendidikan Islam tersebut.
- ¹⁸ Dalam hal ini kita dapat melihat korelasi antara berbagai pemikiran peneliti Barat terhadap politik Indonesia yang membuat pemisahan antara kekuatan Islam dengan bukan Islam.
- ¹⁹ Tentang hubungan antara keberpihakan kaum intelektual dan struktur sosial dapat dilihat dalam buku Brym,Robert.1993.Intelektual dan Politik.Pustaka Utama Grafiti.Jakarta. Dalam halaman 87 misalnya, ia menulis bahwa “*Kesetiaan politik seorang intelektual dipengaruhi oleh posisi sosial keluarga asalnya, oleh karakter kelas atau kelompok dari pendidikan yang diterimanya, serta oleh struktur kesempatan kerja dan kesempatan politik yang dihadapinya selama dan setelah pendidikan formalnya.*”.
- ²⁰ Cahyono, Ma'ruf (ed). 2014. Konstitusi dan MPR, Dalam Dinamika Sejarah. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta. Hlm. 84-90.
- ²¹ Latif, Yudi. 2016. Pembukaan Undang-Undang Dasar Sebagai Cita Negara dan Cita Hukum. Jurnal Ketatanegaraan volume: 001 / Desember 2016 diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI. Hlm. 143. Dalam buku yang lainnya, Yudi Latif menjelaskan secara lebih terinci penjelasan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45 itu dengan cara mengeluarkan dari medan semantiknya dan menerjemahkannya berdasarkan pandangan alam (*worldview*) dan tradisi Barat. Lihat buku Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- ²² Muchariman, Randi. 2016. Siyasah Kebangsaan; Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Menurut perspektif Pemikiran Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun. Penulis Muda: Purwokerto.
- ²³ Panitia Sembilan merupakan panitia informal yang dibentuk tanpa sepengertahan dan diluar jangkauan pengawasan Jepang. Dengan demikian, Pembukaan ini benar-benar menunjukkan dinamika antara kelompok Islam dan Kebangsaan. Jurnal Ketatanegaraan volume 001. Hlm. 8
- ²⁴ <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/24/078839379/dilaporkan-ke-polisi-imi-isi-pidato-lengkap-megawati> diunduh pada tanggal 28 April 2017 jam 09.34
- ²⁵ Hussein Alatas menjelaskan enam ciri-ciri dari penjajahan intelektual yakni eksplorasi, pengawasan, penyesuaian, masyarakat terjajah menempati peran kedua, penjelasan atas penjajahan merupakan upaya pengadaban bagi masyarakat terjajah, dan terakhir bahwa masyarakat terjajah memiliki talenta yang rendah. Lihat lebih lanjut dalam Alatas, Syed Hussein. 2000. Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems. Southeast Asian Journal of Social Science. Volume 28 Number 1. Hlm 23-45.
- ²⁶ Donald Eugene Smith menyebutkan perbandingan antara Islam dan Kristen dalam hubungannya dengan sekularisasi yang menjadi dasar-dasar bagi demokrasi. “Di Barat, Tuhan diyakini ada dalam masyarakat terutama melalui gereja, sebagai struktur nyata yang terpisah dari tatanan dunia. Gereja melembagakan ide transendensi ketuhanan itu, dari keterasingannya. Islam, dengan kesadaran yang bahkan amat tinggi terhadap transendensi ketuhanan itu, tidak memiliki dualitas yang terlembagakan ini dan karenanya tidak mempunyai landasan untuk melakukan sekularisasi masyarakat.” (Smith, Donald Eugene. 1985. Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis. CV Rajawali. Jakarta)
- ²⁷ Titik nodal adalah “*suatu tanda yang mempunyai hak khusus yang tempat sekitarnya bisa digunakan untuk menata tanda-tanda lain. Tanda-tanda lain tersebut memperoleh maknanya dari hubungan dengan titik nodal itu*”. Phillips, Marieanne W.Jorgensen dan Louise J. 2007. Analisis Wacana ; Teori dan Metode. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 49.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Attas, Syed Muhammad Naquib. 2010. Islam dan Sekularism. Pimpin. Bandung.
- Al Attas, Syed Naquib. 1991. Risalah Untuk Kaum Muslimin. Istac. Kuala Lumpur.
- AIN Ghazali.2014. Ihya Ulumiddin. Republika.Jakarta.
- Alatas, Syed Farid. 2010. Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial: Tanggapan terhadap Eurosentrisme. Mizan. Jakarta.
- Alatas, Syed Hussein. 2000. Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems. Southeast Asian Journal of Social Science. Volume 28 Number 1.
- Assyaukanie, Assyaukanie. 2011. Ideologi Islam dan Utopia; Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia. Freedom Institute. Jakarta.
- Baso, Ahmad. 1999. Civil Society Versus Masyarakat Madani : Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia. Pustaka Hidayah. Bandung.
- Brym, Robert. 1993. Intelektual dan Politik. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Bury, J.B. 1913. A History of Freedom of Thought. Newyork. Henry Holt and Company.
- Cahyono, Ma'ruf (ed). 2014. Konstitusi dan MPR, Dalam Dinamika Sejarah. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Chandoke, Neera. 2001. Benturan Negara dan Masyarakat Sipil. Penerbit Wacana. Yogyakarta.
- Dahl, Robert (ed). 2003. The Democracy Soucebook. MIT Press. London.
- Dahl, Robert A. 2003. The Democracy Soucebook. MIT Press. UK.
- Edwards, Michael. 2011. Civil Society. Polity Press. UK.
- Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language. Longman. Newyork.
- Gaffar, Afan. 2002. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gramsci, Antonio. 1992. Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci. New York: International Publishers.. Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith.
- Gramsci, Antonio. 1992. Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci. International Publishers. Newyork. Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith.
- Hefner, Robert. W.. 2001. Civil Islam : Islam dan Demokratisasi di Indonesia. ISAI dan TAF. Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P. . 1997. Gelombang Demokrasi Ketiga. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Jurnal Ketatanegaraan volume: 001 / Desember 2016 diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI. Jakarta.
- Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Latif, Yudi. 2016. Pembukaan Undang-Undang Dasar Sebagai Cita Negara dan Cita Hukum. Jurnal Ketatanegaraan volume: 001 / Desember 2016
- Lipson (1964)
- Lipson, Leslie. 1964. The Democratic Civilization. Oxford University Press. Newyork.
- Markoff, John. 2002. Gelombang Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial Dan Perubahan Politik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Muchariman, Randi. 2016. Kuasa Hegemoni Wacana *Civil Society* (Masyarakat Madani) Nurcholish Madjid dan Perubahan Politik di Indonesia. Tesis di Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Muchariman, Randi. 2016. Siyasah Kebangsaan; Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun. Penulis Muda. Purwokerto.
- Noer, Deliar. 1994. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Phillips, Marieanne W. Jorgensen dan Louise J. 2007. Analisis Wacana ; Teori dan Metode. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Rachman, Budhy Munawar (penyunting). 2006. Ensiklopedi Nurcholish Madjid. Jakarta. Paramadina dan Mizan. Hlm. xxix
- Rachman, Budhy Munawar (penyunting). 2006. Ensiklopedi Nurcholish Madjid. Paramadina dan Mizan. Jakarta.
- Rousseau, Jean Jacques. 1986. Kontrak Sosial. Erlangga. Jakarta.
- Samuel P. Huntington . 1997. Gelombang Demokrasi Ketiga. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Simon, Roger. 2004. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Smith, Donald Eugene. 1985. Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis. CV Rajawali. Jakarta
- Suryadi, Adi. 2006. Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. 1999. Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani. Tim Nasional Reformasi. Jakarta.

Sumber Lainnya.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/24/078839379/dilaporkan-ke-polisi-ini-isi-pidato-lengkap-megawati> diunduh pada tanggal 28 April 2017 jam 09.34